

TESIS

**KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(LPSK) DALAM KERJASAMA KELEMBAGAAN ATAS PEMENUHAN
HAK LAYANAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA DI
INDONESIA**

**MAHARI IS SUBANGUN
221020518062**

**Tesis Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
JAKARTA
TAHUN 2024**

TESIS

**AUTHORITY OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
(LPSK) IN INSTITUTIONAL COOPERATION TO FULFILL THE
RIGHTS OF PSYCHOSOCIAL SERVICES
FOR VICTIMS IN INDONESIA**

**MAHARI IS SUBANGUN
221020518062**

**This Thesis is Submitted as One of the Requirements
To Obtain a Master of Law Degree**



**NATIONAL UNIVERSITY
FACULTY OF LAW
MASTER OF LAW PROGRAM
JAKARTA
2024**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Mahari Is Subangun
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap/18 Juni 1986
Nomor Pokok Mahasiswa : 221020518062
Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul KEWENANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KERJASAMA KELEMBAGAAN ATAS PEMENUHAN HAK LAYANAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA adalah benar hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2024



Mahari Is Subangun

LEMBAR PENGESAHAN PENILAIAN TESIS

Nama : Mahari Is Subangun
Nomor Pokok Mahasiswa : 221020518062
Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Program Studi : Magister Hukum
Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Tesis "KEWENANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KERJASAMA KELEMBAGAAN ATAS PEMENUHAN HAK LAYANAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA"

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 27 Agustus 2024 dan dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dengan nilai "A" dan predikat kelulusan DENGAN PUJIAN.

Jakarta, Agustus 2024

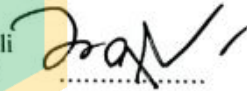
Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan


PIMPINAN SIDANG

Dr. Drs. Tubagus Mochamad Ali
Asgar, SH., M.H., M.M., M. Si



SEKRETARIS SIDANG

Dr. Ummu Salamah,
S. Ag., S.H. M.A



PEMBIMBING

Ahmad Sobari, SH.,M.H., Ph.D



PENGUJI

Dr. Mas Subagyo Eko



Prasetyo, S.H., M.H

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS

Nama : Mahari Is Subangun
Nomor Pokok Mahasiswa : 221020518062
Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Program Studi : Magister Hukum
Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Tesis "KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KERJASAMA KELEMBAGAAN ATAS PEMENUHAN HAK LAYANAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA"

Tesis ini telah diperbaiki berdasarkan petunjuk yang disampaikan oleh Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Ujian Tesis.

Jakarta, Agustus 2024

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

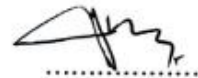
PIMPINAN SIDANG

Dr. Drs. Tubagus Mochamad Ali
Asgar, SH., M.H., M.M., M. Si



SEKRETARIS SIDANG

Dr. Uminu Salamah,
S. Ag., S.H. M.A



PEMBIMBING

Ahmad Sobari, SH.,M.H., Ph.D



PENGUJI

Dr. Mas Subagyo Eko



Prasetyo, S.H., M.H

ABSTRAK

Korban tindak pidana seringkali mengalami trauma mendalam yang berdampak pada aspek psikologis dan sosial mereka. Pemenuhan hak atas layanan psikososial menjadi krusial untuk membantu mereka pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana, memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk layanan psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kewenangan dan peran LPSK dalam kerjasama kelembagaan pemenuhan hak layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang ada dalam implementasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta studi kasus terhadap layanan psikososial yang diberikan oleh LPSK. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara variabel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK memiliki kewenangan yang cukup luas dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, termasuk layanan psikososial. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan layanan psikososial yang optimal, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan psikososial. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mendukung terlaksananya kerjasama kelembagaan dalam pemenuhan hak layanan psikososial, antara lain adanya regulasi yang jelas, komitmen dari berbagai pihak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: psikososial, korban, LPSK

ABSTRACT

Victims of criminal acts often experience deep trauma that impacts their psychological and social well-being. Access to psychosocial services is crucial to help them recover and reintegrate into society. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK), mandated to protect witnesses and victims of criminal acts, plays a significant role in ensuring that the rights of victims, including psychosocial services, are fulfilled. This study aims to thoroughly examine the authority and role of LPSK in inter-institutional cooperation to fulfill the rights of psychosocial services for victims of criminal acts in Indonesia, as well as to identify the challenges and opportunities in its implementation.

This study employs a normative legal approach by analyzing Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, Government Regulation Number 19 of 2015 concerning the Implementation of the Protection of Witnesses and Victims, and other relevant regulations, as well as a case study of psychosocial services provided by LPSK. Data was collected through a literature review, in-depth interviews with relevant parties, and document analysis. The collected data was then qualitatively analyzed to identify patterns, themes, and relationships between research variables.

The results of the study show that LPSK has quite broad authority in providing protection and fulfilling the rights of victims, including psychosocial services. However, in practice, there are still several obstacles hindering the optimal implementation of psychosocial services, such as limited resources, suboptimal inter-institutional coordination, and lack of public awareness of the importance of psychosocial services. This study also identifies several factors that can support inter-institutional cooperation in fulfilling the rights of psychosocial services, including clear regulations, commitment from various parties, and increased human resource capacity.

Keyword: Psycosocial, vitims, LPSK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan nikmat yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Kerjasama Kelembagaan Atas Pemenuhan Hak Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana Di Indonesia”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga. Tugas akhir ini dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. Proses perkuliahan dari awal sampai penyusunan tesis ini melibatkan banyak saran, bimbingan, dan dukungan moral dalam mengatasi permasalahan terutama hingga berkomitmen menyelesaikan studi ini.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Bapak Dr. Drs. Tubagus Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.M., M.Si., selaku Ketua Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional atas dorongan dan dukungan penyelesaian tesis ;
4. Ibu Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA., selaku Sekretaris Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional atas segala saran dan

masuk dalam sidang proposal, sidang hasil penelitian maupun sidang akhir tesis;

5. Bapak Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama proses bimbingan berlangsung hingga terselesaikannya tesis ini;
6. Penguji ahli Dr. Hamdan, SH., M. H, atas masukan dan penyempurnaan yang diberikan;
7. Para dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Nasional dalam memberi pengetahuan yang bermanfaat;
8. Pimpinan dan Sekretaris Jenderal serta seluruh pegawai pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Ibu tercinta dan alm. Bapak yang telah mendahului, terimakasih atas bekal yang telah diberikan, semoga Allah SWT menempatkan beliau di sisinya;
10. Alfiah Sariningsih istri tercinta dan putra kami, Pradita, Baihaqi dan Aksa, atas dukungan, motivasi, dan kesediaan berbagi waktu.

Besar keyakinan saya, semua bantuan yang diberikan akan menjadi ladang amal yang dibalas dengan berjuta kebaikan. Pada aspek pengetahuan, semoga tesis ini mampu berkontribusi dalam pengembangan penelitian hukum tata negara.

Depok, 19 Agustus 2024

Mahari Is Subangun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	17
F. Metode Penelitian.....	29
G. Keaslian Penelitian.....	36
H. Sistematika Penelitian.....	38
BAB II TINJAUAN UMUM LAYANAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA	
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.....	41
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Psikososial.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Kerjasama Kelembagaan.....	54

BAB III FAKTA-FAKTA LAYANAN PSIKOSOSIAL DAN KERJASAMA

KELEMBAGAANNYA	60
A. Masalah Kewenangan Perundang-Undangan	60
B. Masalah Program dan Pendanaan	69
C. Kerjasama Kelembagaan.....	74

BAB IV ANALISIS KEWENANGAN DAN PERAN LPSK DALAM KERJASAMA KELEMBAGAAN PELAKSANAAN LAYANAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA

A. LPSK Dalam Layanan Psikososial: Pemenuhan Kewenangan dan Tanggung Jawab Negara.	
B. Strategi Kerjasama Kelembagaan Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang Rencana Aksi Nasional Layanan Psikososial.	
C. Peraturan Pemerintah Tentang Dana Bantuan Korban Sebagai Akses Pendanaan Layanan Psikososial.	
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	104



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah Permohonan LPSK 2021 s.d 2023	6
Tabel 3.1: Program Perlindungan LPSK 2022.....	70
Tabel 3.2: Kerjasama LPSK dengan Instansi Tahun 2022	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Pelatihan Barista , Kerjasama LPSK dan YIIM..... 72

Gambar 3.2: *Wordcloud* Masalah Mendasar Layanan Rehabilitasi Psikososial... 73



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: TRANSKRIP WAWANCARA INTERNAL LPSK	105
LAMPIRAN 2: WAWANCARA EKTERNAL	107

